

**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) TAHUN 2020**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian/realisasi indikator kinerja dari tujuan/sasaran strategis. Untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti dirumuskan dalam rencana strategis. Untuk mempertahankan capaian kinerja bahkan meningkatkannya, diperlukan berbagai langkah dan usaha melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung sasaran serta lebih mengintensifkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaannya, dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





## KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia ke hadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugrah dan bimbingan-Nya, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dapat merampungkan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja selama tahun 2020, sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat capaian setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan LKjIP juga merupakan salah satu prasyarat untuk turut serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2020 beserta analisis capaiannya. Secara umum target dan realisasi capaian kinerja akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

Atas peran serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2020 ini diucapkan terima kasih.

Om Santih Santih Santih Om.

KEPALA DINAS,

**IDA BAGUS NGURAH ARDA**

NIP. 19621231 198512 1 068





## DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Struktur Organisasi .....	2
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi. ....	5
1.3 Keadaan Pegawai .....	6
1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	8
1.5 Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) Organisasi.....	9
1.6 Sistematika Laporan Kinerja .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	12
2.1.1 Visi dan Misi .....	12
2.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	14
2.1.3 Strategi dan Kebijakan.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	19
2.3 Rencana Anggaran.....	20
2.4 Instrumen Pendukung .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	23
3.2 Realisasi Anggaran .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>

Lampiran - lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2020





## **BAB I. PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.





## 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok Fungsional, sesuai Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas:
2. Sekretariat, meliputi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas:
  - a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan.
  - b. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi.
  - c. Seksi Pengembangan dan Produktivitas.
4. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan:
  - a. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.
  - b. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial.
  - c. Pengawasan Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Dan Transmigrasi:
  - a. Penempatan tenaga Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
  - b. Perluasan Kesempatan Kerja.
  - c. Seksi Transmigrasi.



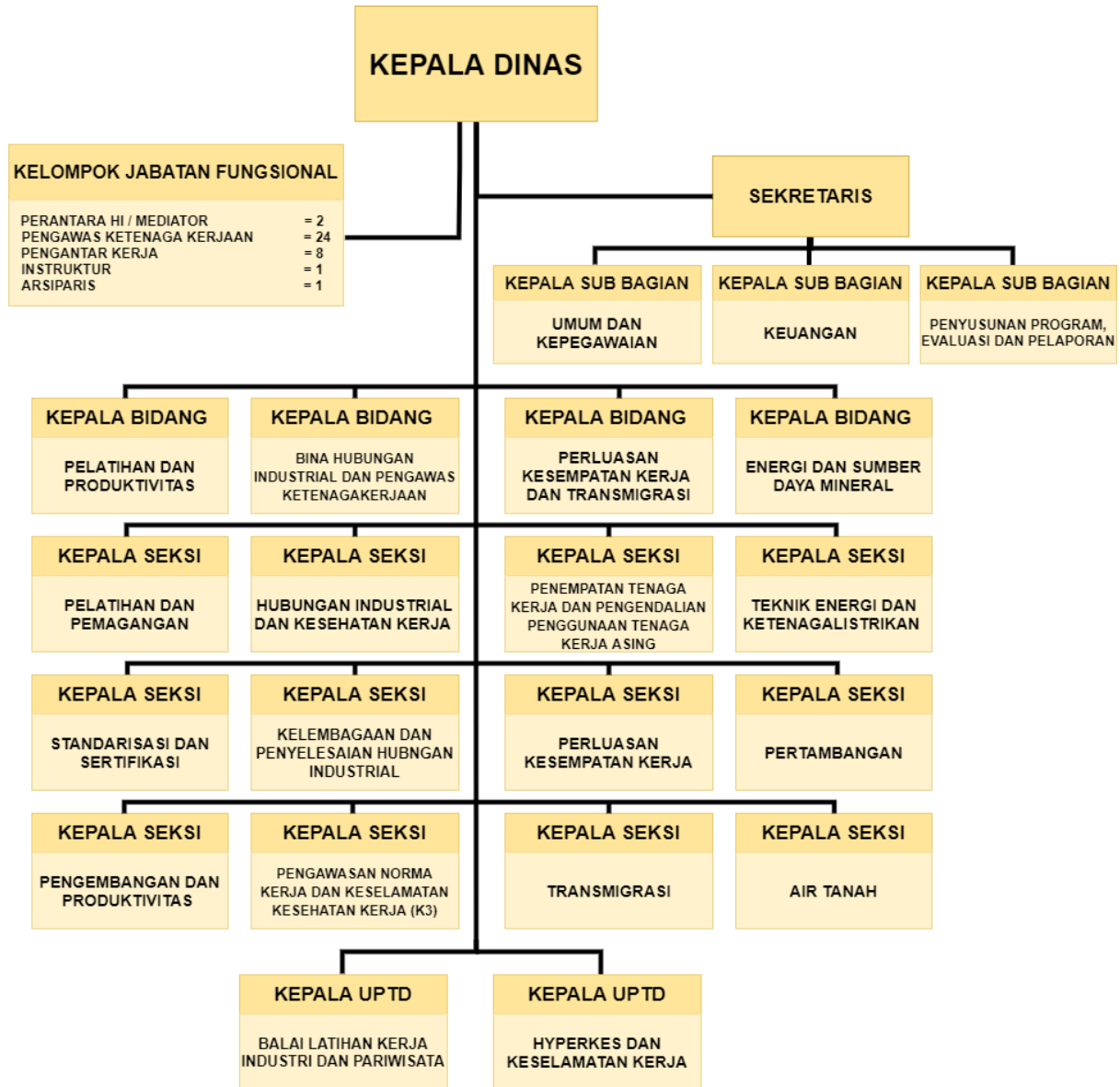


6. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral:
  - a. Seksi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan.
  - b. Seksi Pertambangan.
  - c. Seksi Air Tanah.
7. UPTD Balai Latihan Kerja Industri Dan Pariwisata:
  - a. Sub. Bagian Tata Usaha.
  - b. Seksi Program dan Evaluasi.
  - c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemasaran.
8. UPTD Hyperkes Dan Keselamatan Kerja:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha.
  - b. Seksi Pelayanan.
  - c. Seksi Standarisasi Mutu dan Evaluasi.
9. Jabatan Fungsional.





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI







## 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mempunyai Tugas Pokok yaitu: sebagai pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral. Dan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Dinas dimaksud, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral.
2. Pengelolaan fasilitas sesuai kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai bidang ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral.
5. Pelaksanaan urusan sekretariat.





### 1.3 Keadaan Pegawai

Jumlah personil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali termasuk 2 UPTD, sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 adalah sebanyak 126 orang dengan distribusi seperti tabel berikut:

Tabel 1.  
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali berdasarkan Golongan:

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
		(orang)
1	Golongan IV	40
2	Golongan III	75
3	Golongan II	11
4	Golongan I	-
<b>JUMLAH</b>		<b>126</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 2.  
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	
		(orang)	(%)
1	Pasca Sarjana (S2)	25	16,55
2	Sarjana (S1)	75	58,99
3	D III	4	4,31
4	Sarjana Muda	-	-
5	SLTA	22	20,14
6	SLTP	-	-
7	SD	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>126</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel 3.  
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Berdasarkan Unit Kerja :

NO.	Unit / Bidang	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kabid. BHI dan Pengawasan Ketenagakerjaan	1
4	Kabid. Pelatihan dan Produktivitas	1
5	Kabid. Penempatan dan Perluasan Kerja dan Transmigrasi	1
6	Kabid. Energi dan Sumber Daya Mineral	1
7	Kepala UPTD BLKIP	-
8	Kepala UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	-
NO.	Unit / Bidang	Jumlah + Staf (orang)
9	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	6
10	Kasubbag. Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan	1
11	Kasubbag. Keuangan	9
12	Kasi. Penempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan TKA	1
13	Kasi. Perluasan Kesempatan Kerja	1
14	Kasi. Transmigrasi	4
15	Kasi. Pelatihan dan Pemagangan	1
16	Kasi. Pengembangan dan Produktifitas	2
17	Kasi. Standarisasi dan Sertifikasi	4
18	Kasi. Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	-
19	Kasi. Pengawasan dan Norma Kerjas K3	1
20	Kasi. Kelembagaan dan PHI	-
21	Kasi. Air Tanah	3
22	Kasi. Teknik Energi dan Ketenagalistrikan	4
23	Kasi. Pertambangan	4
24	Kasubbag. Tata Usaha UPTD BLKIP	7
25	Kasi. Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemasaran UPT BLKIP	4





26	Kasi. Program dan Evaluasi pada UPT BLKIP	2
27	Kasi. Pelayanan	2
28		1
29	Instruktur UPTD BLKIP	10
30	Arsiparis	2
31	Kasubbag. Tata Usaha pada UPTD Hyperkes	5
32	Fungsional	46
<b>JUMLAH</b>		<b>126</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 4.  
Jumlah Eselon pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi  
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

NO.	Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon 2	1
2	Eselon 3	5
3	Eselon 4	18
4	Non Struktural	102
<b>JUMLAH</b>		<b>126</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

#### 1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana.





Tabel 5  
Sarana dan Prasarana yang Ada  
Pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali

NO.	JENIS	JUMLAH
1.	Gedung	5 Unit
2.	Kendaraan roda empat	16 Unit
3.	Kendaraan roda dua	32 Unit
4.	Note Book	28 Unit
5.	Printer	38 Unit
7.	Personal Computer	48 Unit
8.	Meja	129 Unit
9.	Kursi	129 Unit

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

### 1.5 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagai Pembantu Kepala Daerah pada urusan tenaga kerja dan energi sumber daya mineral sangatlah beragam. Ada pun beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- b. Terbatasnya sertifikasi profesi (LSP) selain sektor pariwisata.
- c. Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri.
- d. Banyak perusahaan mengirim tenaga kerja ke luar negeri tidak memiliki ijin.
- e. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan pasar.
- f. Kurang pahamnya tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri terhadap perlindungan dan hak-haknya.
- g. Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja. Hal ini karena belum optimalnya pembinaan terhadap pengusaha.





- h. Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja akibat terbatasnya kemampuan perusahaan secara finansial.
- i. Belum ditetapkannya sanksi secara tegas terhadap perusahaan yang belum melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.
- j. Pengembangan energi terbarukan belum optimal dikarenakan secara perhitungan ekonomi biaya mahal sehingga niat untuk berinvestasi rendah.
- k. Kerjasama dengan stakeholder terkait kasusnya akademisi untuk pengembangan teknologi pemanfaat teknologi terbarukan diperlukan.
- l. Minimnya Sumber Daya Manusia yang kompeten.
- m. Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani energy sumber daya mineral.
- n. Pengambilan air tanah secara berlebihan mengakibatkan terjadinya intrusi/pencemaran air laut pada air tanah di wilayah pesisir.
- o. Ketahanan sumber daya air di daerah penurunan kualitas hidup.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dirumuskanlah beberapa Isu Strategis sebagai berikut:

1. Masih banyaknya Tenaga Kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi
2. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi yang *link and match* dengan kebutuhan industri di dalam dan di luar negeri
3. Kurang patuhnya pengusaha terhadap norma kerja, norma K3 dan kesejahteraan pekerja
4. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Belum Optimal Serta Pemanfaatan Air Tanah Semakin Meningkat.





## 1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2020. Dalam laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Bali. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, permasalahan utama (*strategic issued*) organisasi, serta sekilas pengantar lainnya.

### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Memuat visi dan misi Pemerintah Daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2020.

### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja, serta realisasi anggaran.

### **Bab IV : Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja.





## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Visi tersebut dimaksudkan untuk menuju Bali Era Baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, krama dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi. Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dengan 22 misinya diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Pola pembangunan semesta berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Pembangunan Semesta Berencana berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi* yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*) serta landasan filosofi *Tri Hita Karana* yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi* tentram *kerta raharja*, *gemah ripah lohjinawi*.







Agar dapat mewujudkan Visi “ Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali mengatasi berbagai permasalahan Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral yang ada serta guna mengatasi segenap kemungkinan munculnya berbagai permasalahan dan perkembangan yang ada, maka Program Prioritas Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM diimplementasikan dengan 10 Program dan 85 Kegiatan, yang diharapkan dapat berperan dalam memberikan kesempatan dan mendorong kepada dunia usaha dan masyarakat melalui regulasi, fasilitasi dan public service, agar mereka mampu mengembangkan usaha, kreativitas dan inovasinya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Guna mewujudkan visi di atas, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Mengampu 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegrasi, Bermutu, Profesional dan Bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali (Misi 6);
2. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri (Misi 8);
3. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komperhensif, mudah dijangkau, bermutu dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri (Misi 9);
4. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih (Misi 21).





### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam mendukung Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sesuai tugas dan fungsinya mengampu empat misi, yaitu misi 6, 8, 9, dan 21. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi;
2. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing;
3. Terwujudnya Jaminan Ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan;
4. Terwujudnya Wilayah dan Lingkungan hidup yang bersih, hijau dan Indah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang dituju yaitu sebagaimana tertuang pada tabel keterkaitan tujuan dan sasaran berikut:

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran DisnakerESDM Provinsi Bali

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi	1	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali
2	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berkompeten dan Berdaya Saing	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja</li> <li>• Meningkatkan Akses Bagi Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri</li> </ul>
3	Terwujudnya Jaminan Ketenagakerjaan yang Terjangkau, Bermutu dan Berkelanjutan	3	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4	Terwujudnya Wilayah dan Lingkungan Hidup yang Bersih, Hijau dan Indah	4	Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan





### 2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

<b>2.1.3.1 Misi Keenam</b>	<b>: Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali.</b>
Strategi	: Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan serta meningkatkan kualitas instruktur
Kebijakan	: Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, sertifikasi dan standarisasi
Program	: Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Bali</li> <li>2. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)</li> <li>3. Seleksi dan Pembinaan <i>Asean Skills Competition (ASC)</i></li> <li>4. Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi</li> <li>5. Pengembangan Sistem Link and Match antara Kompetensi Kewirausahaan Krama Bali dengan Dunia Usaha dan industri</li> <li>6. Pemasarakatan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan Siddhakarya</li> </ol>





7. Pengembangan Sistem Link and Match antara Kompetensi Tenaga Kerja Krama Bali dengan Dunia Usaha dan industri
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja melalui inkubator bisnis dan pendidikan/pelatihan kerja
9. Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan wirausaha baru
10. Peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi peluang kerja pada rencana investasi yang dikembangkan

### 2.1.3.2 Misi Kedelapan

**: Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.**

- Strategi : Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan serta meningkatkan kualitas instruktur
- Kebijakan : Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, sertifikasi dan standarisasi
- Program : Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja
- Kegiatan :
  1. Pelatihan keterampilan berbasis masyarakat;
  2. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja paripurna berdasarkan buku biru sesuai kebutuhan pasar domestik dan global
  3. Pengembangan Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi penderita cacat permanen





4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan industri dan pariwisata;
5. Identifikasi kebutuhan latihan;

**2.1.3.3 Misi Kesembilan : Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial dan Perlindungan Tenaga Kerja yang Komperhensif, mudah dijangkau, bermutu dan terintergrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.**

- Strategi : Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan kondisi lingkungan kerja sesuai norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Kebijakan : Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui pengupahan, jaminan sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan peningkatan kesejahteraan pekerja
- Program : Perlindungan Tenaga Kerja
- Kegiatan :
  1. Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan
  2. Pembahasan dan Penetapan Keputusan Gubernur tentang UMP dan UMK
  3. Pengendalian dan Pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam perluasan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan
  4. Peningkatan Peran LKS Bipartit di Perusahaan dan LKS Tripartit
  5. Peningkatan pemahaman mekanisme penyelesaian hubungan industrial dan verifikasi data penyelesaian hubungan industrial





6. Pengembangan jaminan sosial kesehatan pekerja krama bali berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sejahtera (KBS)
- Program : Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja
- Kegiatan : 1. Pengadaan Bahan Kimia  
2. Pemeriksaan kesehatan tenaga Kerja  
3. Pengujian Lingkungan Kerja.

**2.1.3.4 Misi Keduapuluh Satu : Mengembangkan Tata kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah dan Lingkungan yang Bersih, Hijau dan Indah.**

- Strategi : Meningkatkan Tata Kehidupan Krama Bali yang Harmonis berbasis Wilayah dan Lingkungan.
- Kebijakan : Terkelolanya dan Terlaksananya pengembangan usaha-usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Program : Pengelolaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kegiatan : 1. Pengembangan ketenagalistrikan  
2. Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi terbarukan  
3. Pengembangan Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan  
4. Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan  
5. Pengembangan air tanah dan geologi lingkungan  
6. Pengelolaan air tanah





## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020  
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai evaluasi manajemen kinerja	persen	81,5
2.	Meningkatnya sumber daya krama Bali yang kompeten, kreatif, inovatif, dan produktif serta berintegritas	Persentase tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikat	persen	43,44
3.	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan luar negeri	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	Orang	2.035
		Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri kas Bali	kawasan	1
4.	Meningkatnya kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan Tenaga Kerja	persen	5,72





5.	Terwujudnya Tata kehidupan krama Bali yang harmonis berbasis wilayah dan lingkungan	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	MW	15
		Persentase Perusahaan Sumber Daya Mineral yang sesuai ketentuan	persen	65
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi yang disusun	dokumen	4
7.	Meningkatnya Calon Tenaga Kerja yang Kompeten	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	persen	90
		Persentase Lulusan BLK yang Bekerja	Persen	90
8.	Meningkatnya kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja	Persentase perusahaan yang diuji lingkungan kerjanya serta kesehatan kerja bagi tenaga kerja	persen	70

### 2.3 Rencana Anggaran

Pada tahun 2020 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran induk sebesar Rp. 26.518.016.722 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 21.932.201.569,00
- Belanja Langsung : Rp. 30.755.463.339,00

Setelah melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2020 menjadi Rp. 26.618.016.722 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 22.141.823.366,00
- Belanja Langsung : Rp. 4.476.193.356,00

Selain mengelola program/kegiatan melalui alokasi APBD, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga mengelola kegiatan melalui alokasi anggaran belanja APBN, yaitu Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 4.398.965.000,00. Ada pun realisasi untuk Dana Dekonsentrasi adalah sebesar Rp. 4.175.161.231,00, atau sebesar 94,91%.







## 2.4 Instrumen Pendukung

### A. UPTD

#### 1. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata

UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang mempunyai tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sebelum pelatihan diselenggarakan, diperlukan analisa kebutuhan pelatihan sesuai dengan peta potensi kebutuhan dunia usaha dan industri sebagai langkah/tahapan penilaian dari proses pelatihan.

#### 2. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja

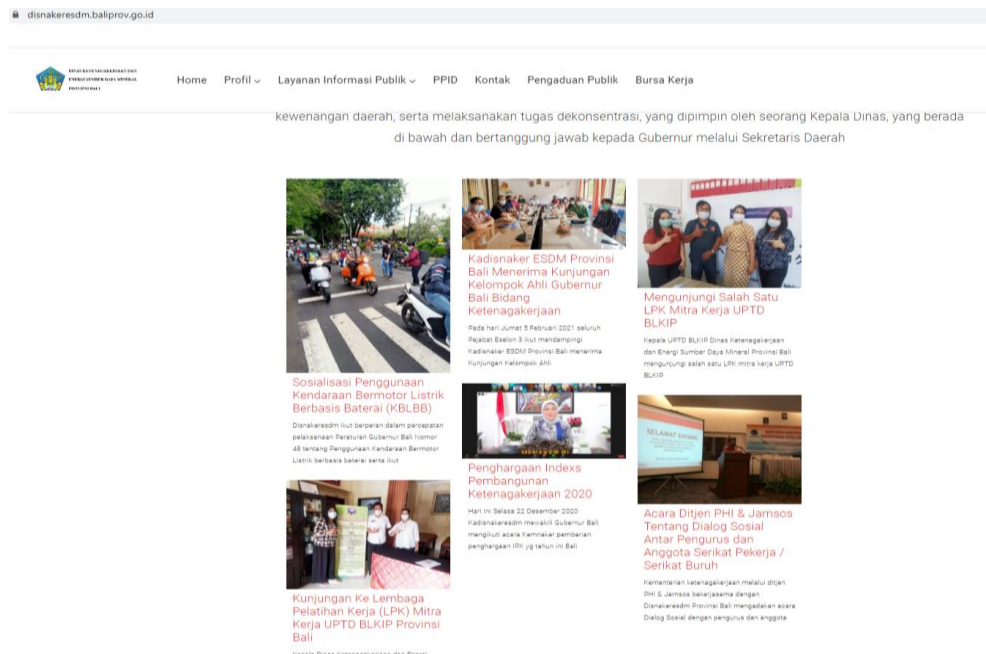
UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Salah satu tugas dari UPTD Balai Hyperkes Dan Keselamatan Kerja adalah memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyesuaian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan sehat.





## B. Informasi Berbasis Internet

Penyebaran informasi tentang kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali kepada masyarakat umum sangatlah penting. Selain bekerjasama dengan media cetak dan elektronik, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga memiliki website ([www.disnakeresdm.baliprov.go.id](http://www.disnakeresdm.baliprov.go.id)) yang isinya terus di *update*. Dengan website ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang keberadaan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dan juga memberikan informasi mengenai kegiatan - kegiatan yang diselenggarakan.





## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan serta pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan, selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:





Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai evaluasi manajemen kinerja	persen	81,5	86,54	86,54	Tinggi
2.	Meningkatnya sumber daya krama Bali yang kompeten, kreatif, inovatif, dan produktif serta berintegritas	Persentase tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikat	persen	43,44	44,57	102,6	Sangat Baik
3.	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan luar negeri	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	orang	2.035	1.273	62,5	Rendah
		Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri kas Bali	kawasan	1	0	0	Sangat Rendah
4.	Meningkatnya kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan Tenaga Kerja	persen	5,72	5,72	100	Sangat Baik
5.	Terwujudnya Tata kehidupan krama Bali yang harmonis berbasis wilayah dan lingkungan	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	MW	15	6,39	42,6	Sangat Rendah
		Persentase perusahaan Sumber Daya Mineral yang sesuai ketentuan	persen	65	97	149	Sangat Baik





6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi yang disusun	dokumen	4	0	0	Sangat rendah
7.	Meningkatnya Calon Tenaga Kerja yang Kompeten	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	persen	90	10,8	12	Sangat rendah
		Persentase Lulusan BLK yang Bekerja	Persen	90	10,8	12	Sangat rendah
8.	Meningkatnya kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja	Persentase perusahaan yang diuji lingkungan kerjanya serta kesehatan kerja bagi tenaga kerja	persen	70	10	14,2	Sangat rendah

Dari tabel di atas, terdapat sebelas indikator yang terbagi ke dalam delapan sasaran strategis. Ada pun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut tujuan/sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja diupayakan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.938.061.328,00, dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pencapaian nilai evaluasi manajemen kinerja sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2020, target Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja sebesar 81,5 dapat terealisasi 86,54 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.856.993.163,00 (97,24%).





Walaupun ada beberapa kegiatan pada Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja tidak dapat terlaksana karena adanya *refocussing* program/kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19, akan tetapi Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yaitu sebesar 86,54, atau peringkat kedua dengan nilai tertinggi dari seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Bali. Hal ini karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait demi hasil yang maksimal. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 83,64, maka pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 2,90%.

### **3.1.2. Meningkatnya Sumber Daya Krama Bali yang kompeten, kreatif, inovatif dan produktif serta berintegritas**

Meningkatnya Sumber Daya Krama Bali yang kompeten, kreatif, inovatif dan produktif serta berintegritas diupayakan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja. Total anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp. 196.378.600,00. Indikator kinerja program ini adalah persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi dengan target kinerja 43,44%. Realisasi capaian kinerjanya 44,57% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 196.378.600,00 (100%).

Berbagai kegiatan direncanakan untuk mendukung peningkatan sumber daya krama Bali yang kompeten, kreatif, inovatif dan produktif serta berintegritas seperti kegiatan; Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Bali, Seleksi dan Pembinaan Asean *Skills Competition* (ASC), Pengembangan Sistem *Link And Match* antara Kompetensi Kewirausahaan Krama Bali dengan Dunia Usaha dan Industri, Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja melalui Inkubator Bisnis dan Pendidikan/Pelatihan Kerja, dan kegiatan lainnya.





Akan tetapi, seluruh kegiatan yang direncanakan tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya *refocussing* program/kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19.

Pencapaian atas target program dapat terealisasi 44,57% (bahkan melampaui target) karena adanya sinergitas dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang tetap melaksanakan sertifikasi dengan dukungan dana tidak hanya dari Pemerintah Daerah tetapi juga dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Kementrian/Lembaga pelaksana sertifikasi, maupun secara Mandiri oleh tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 43,98%, maka pencapaian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,59%.

### **3.1.3. Meningkatnya akses bagi Tenaga kerja di dalam dan Luar Negeri**

Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan luar negeri diupayakan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Total anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp. 26.037.750,00. Indikator kinerja program ini adalah jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan dengan target 2.035 orang. Realisasi capaian kinerjanya 1.273 orang atau 62,5%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.037.750,00 (100%). Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 6.292 orang, maka pencapaian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sekitar 5.019 orang.





Selain melalui Program Peningkatan Kualitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan luar negeri juga diupayakan melalui program pengembangan kawasan sektor informal. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp. 4.189.700,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.189.700,00 (100%). Indikator kinerja program ini adalah jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali dengan target kinerja 1 kawasan. Pengembangan kawasan pada tahun 2020 direncanakan adalah di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, akan tetapi tidak dapat terealisasi karena adanya *refocussing* program/kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19. Seperti halnya pada tahun 2020, pada tahun sebelumnya, pengembangan kawasan juga tidak dapat terealisasi karena keterbatasan anggaran.

#### **3.1.4. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.**

Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diupayakan melalui Program Perlindungan Tenaga Kerja. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp. 73.550.400,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.550.400,00 (100%). Indikator kinerja program perlindungan tenaga kerja adalah persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja dengan target kinerja 5,72%, dan capaian kinerjanya 5,72%, atau terealisasi 100%.

Berbagai kegiatan direncanakan pelaksanaannya pada program perlindungan tenaga kerja seperti; Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan, Peningkatan Peran LKS Bipartit di Perusahaan dan LKS Tripartit, Pengembangan Jaminan Sosial







Kesehatan Pekerja Krama Bali Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan berbasis Krama Bali sejahtera (KBS), dan kegiatan lainnya. Akan tetapi, hampir seluruh kegiatan yang direncanakan tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya *refocussing* program/kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19.

Pencapaian atas target program dapat terealisasi karena Optimalisasi Fungsional Wasnaker Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang secara optimal mengawasi perusahaan yang ada. Sebanyak 26 Wasnaker, masing-masing bertugas untuk 60 perusahaan per tahun, sehingga target 1.560 perusahaan per tahun dapat tercapai, dan target sebesar 5.72% dapat terealisasi. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,23%, maka pencapaian pada tahun 2020 juga sudah sesuai dengan target.

### **3.1.5. Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis berbasis wilayah dan lingkungan.**

Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis berbasis wilayah dan lingkungan diupayakan melalui Program Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah Rp. 227.783.292,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 227.483.030,00 (98,87%). Indikator kinerja program ini adalah Jumlah Kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan target kinerja 15 Mw, dan realisasi capaian sebesar 6,39 Mw, serta persentase pengusaha sumber daya mineral yang sesuai ketentuan dengan target 65%, dan terealisasi sebesar 97%. Ada pun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya;





a. Pengembangan Ketenagalistrikan

merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh dan menginventarisir data potensi energi terbarukan dan kondisi eksisting ketenagalistrikan, melakukan kegiatan pengembangan energi terbarukan dan ketenagalistrikan, menyiapkan regulasi sektor energi dan ketenagalistrikan untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen, serta melakukan upaya pengembangan energi terbarukan.

b. Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan

merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti permohonan Rekomendasi Teknis Energi dan Ketenagalistrikan dari DPM & PTSP Provinsi Bali untuk izin energi terbarukan dan izin ketenagalistrikan. Kegiatannya berupa peninjauan lapangan sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengembangan energi terbarukan dan ketenagalistrikan (genset). Kegiatan ini juga melakukan pengelolaan usaha ketenagalistrikan dan energi terbarukan serta melakukan monitoring, inventarisir, dan pembinaan untuk usaha ketenagalistrikan dan energi terbarukan.

c. Percepatan Pembangunan Politeknik Energi Baru terbarukan dan Ketenagalistrikan di Provinsi Bali

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pembebasan lahan seluas 10 HA sebagai lokasi Pembangunan Politeknik Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan di Provinsi Bali yang diharapkan dapat menjadi tempat untuk meningkatkan SDM berbasis kompetensi di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi, menjadi pusat unggulan energi





bersih di Bali (*centre of excellence for clean energy*), serta mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Bali Energi Bersih sesuai Pergub Bali Nomor 45 tahun 2019. Akan tetapi dikarenakan adanya pandemic covid-19 anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 dan berdampak pada kegiatan ini belum bisa dilaksanakan karena *direfocussing*.

d. Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah agar seluruh usaha pertambangan memiliki Izin Usaha Pertambangan, sehingga pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap aktifitas pertambangan yang tidak menaati peraturan yang berlaku serta ada pendapatan (pajak) bagi Daerah.

e. Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk melakukan monitoring kegiatan konservasi air tanah dan pengamatan jaringan 17 unit sumur pantau yang tersebar di kabupaten/kota. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan data-data (fluktuasi muka air tanah, selain itu untuk monitoring pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah dari para pelaku pengambilan dan pengusaha air tanah).

f. Pengembangan Air Tanah dan Geologi Lingkungan

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk konservasi air tanah dan pengamatan jaringan 17 unit sumur pantau yang tersebar di kabupaten/kota. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan data-data (fluktuasi muka air tanah, selain itu juga untuk monitoring pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah dari para pelaku pengambilan dan pengusaha air tanah) sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan





pengelolaan air tanah. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pendapatan di Kabupaten/Kota, Badan Geologi Kementerian ESDM serta aparat hukum senantiasa dilakukan untuk optimalisasi pengelolaan air tanah di Provinsi Bali.

#### g. Pengelolaan Air Tanah

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti permohonan Rekomendasi Teknis Air Tanah dari DPM & PTSP Provinsi Bali untuk izin Pengusahaan Air Tanah. Kegiatan berupa peninjauan lapangan sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan kegiatan pengambilan air tanah baik dari segi pembatasan debit maupun kewajiban pajak air tanah, sehingga keberadaan air tanah dapat lestari dan pemanfaatannya berkelanjutan.

Dalam perkembangannya, tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai target karena adanya *refocussing* program/kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19. Realisasi capaian kinerja sebesar 6,39 Mw dari target 15 Mw disebabkan karena PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dengan leading sektornya pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, yang diharapkan dapat berkontribusi sebesar 15 Mw belum terwujud, sehingga target kinerja juga tidak tercapai. Sedangkan persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 97% dikarenakan adanya pembaharuan Retek/Rekomendasi Teknis dengan beberapa ketentuan yang mengikat (passing gradenya tinggi), sehingga diperkirakan sebanyak





3% terjadi ketidakpatuhan yang memungkinkan dicabutnya rekomendasi yang diberikan (masih dalam proses evaluasi).

### 3.1.6 Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Menurunnya kinerja perekonomian Bali salah satunya berdampak pada kondisi ketenagakerjaan masyarakat Bali. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat menunjukkan peningkatan dari sebesar 1,57% pada Agustus 2019 menjadi 5,63% pada Agustus 2020. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, salah satunya adalah melalui Program Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketransmigrasian, dengan target sebanyak 4 dokumen laporan evaluasi yang disusun. Akan tetapi dalam perkembangannya, kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya *refocussing* program/kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19, sehingga apa yang menjadi target sebelumnya tidak dapat terealisasi. Program transmigrasi ini pada dasarnya dilaksanakan untuk menyeimbangkan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, mempercepat laju pembangunan daerah, pemerataan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta meningkatkan taraf hidup para transmigran. Melalui program transmigrasi ini juga diharapkan menciptakan lapangan kerja melalui pemanfaatan sumber-sumber alam yang tersedia sehingga nantinya dapat mengurangi angka pengangguran yang ada.

### 3.1.7 Meningkatnya Calon Tenaga Kerja Yang Kompeten





Meningkatnya calon tenaga kerja yang kompeten diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang mempunyai tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Perencanaan penyiapan SDM diorientasikan untuk menghasilkan SDM yang memiliki daya saing. Peningkatan daya saing SDM dapat dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya melalui pendidikan, pelatihan kerja dan pengalaman di tempat kerja. Pendidikan dan pelatihan kerja harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai kualitas, keterampilan, profesionalisme dan kompetensi yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan kerja harus dilakukan secara sinergi dan bermuara kepada peningkatan kompetensi kerja.

Program yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata adalah Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja, dengan berbagai kegiatan yang direncanakan seperti; Identifikasi Kebutuhan Latihan, Pelatihan Ketrampilan Berbasis Masyarakat, Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Paripurna (Dilatih, Diidentifikasi dan Ditempatkan) Berdasarkan Buku Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Krama Bali sesuai dengan Kebutuhan Pasar Domestik dan Global, Pengembangan Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi Penderita Cacat Permanen, serta Sertifikasi Instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan Kompetensi Teknis yang Dibutuhkan. Akan tetapi dalam perkembangannya, hampir seluruh kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya





*refocussing* program/kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19, sehingga apa yang menjadi target sebelumnya tidak dapat tercapai.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 602.621.036,00, termasuk di dalamnya mengakomodasi kegiatan rutin urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 598.506.219,00 (99,32%). Indikator kinerja program ini adalah persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi dengan target kinerja 90%, dan realisasi capaian kinerjanya hanya sebesar 10,8%. Perlambatan/menurunnya kinerja ekonomi Bali dampak Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap penyerapan calon tenaga kerja di pasar kerja, dan sangat berpengaruh pula pada capaian kinerja yang sangat rendah. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 63,21%, maka pencapaian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sekitar 52,41%.

Selain melalui Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja, meningkatnya calon tenaga kerja yang kompeten juga diupayakan melalui Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/ *Techno Park*. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 7.013.700,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.013.700,00 (100%). Berbagai kegiatan yang direncanakan seperti; Pengembangan Fasilitas dan Tenaga Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) yang Mempunyai Kompetensi Sesuai dengan Hasil Pemetaan Pengembangan Usaha, Industri dan Usaha Produk Unggulan Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota, juga tidak dapat terlaksana karena adanya *refocussing* program/kegiatan untuk percepatan penanganan



Covid-19, sehingga indikator kinerja persentase lulusan BLK yang bekerja dengan target sebesar 90% hanya dapat terealisasi sebesar 10,8%.



*Gambar 1: Pelatihan MTU di BLK-IP*



*Gambar 2: Pelatihan Kejuruan Tata Hidangan di BLK-IP*







### 3.1.8 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja

Meningkatnya kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Salah satu tugas dari UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyesuaian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan sehat.

Program yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja melalui berbagai kegiatan seperti; Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja, Pelatihan Keselamatan Kerja dan Hyperkes, Kalibrasi Alat-alat Pemeriksaan Kesehatan, dan kegiatan lainnya, yang pada perkembangannya hampir seluruh kegiatan yang direncanakan tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya *refocussing* program/kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19, sehingga persentase perusahaan yang diuji lingkungan kerjanya serta kesehatan kerja bagi tenaga kerja dengan target 70% hanya dapat terealisasi sebesar 10%, atau hanya sebanyak 7 perusahaan dari 70 perusahaan yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan tahun





sebelumnya, target sebanyak 60 perusahaan dapat terealisasi sepenuhnya, atau terealisasi sebesar 100%.Ini dikarenakan akibat anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19(terjadi refocussing anggaran)

### 3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Langsung setelah perubahan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2020 sebesar Rp. 4.386.567.081,00 (98,00%) dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 4.476.193.356,00. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 4.464.989.956,00 (97,99%) sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 11.203.400,00. Secara garis besar serapan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





**Realisasi Pendapatan dan Belanja  
Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral  
Provinsi Bali Tahun 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>403.600.000,00</b>	<b>230.419.200,00</b>	<b>57,09</b>
	1. Pendapatan Asli Daerah	403.600.000,00	230.419.200,00	57,09
	2. Hasil Retribusi Daerah	403.600.000,00	230.419.200,00	57,09
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>26.618.016.722,00</b>	<b>26.032.031.840,00</b>	<b>97,80</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>22.141.823.366,00</b>	<b>21.645.464.759,00</b>	<b>97,76</b>
	Belanja Pegawai	22.141.823.366,00	21.645.464.759,00	97,76
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.476.193.356,00</b>	<b>4.386.567.081,00</b>	<b>98,00</b>
	Belanja Pegawai	36.030.000,00	36.030.000,00	100
	Belanja Barang dan Jasa	4.360.563.356,00	4.270.937.081,00	97,94
	Belanja Modal	79.600.000,00	79.600.000,00	100
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(26.214.416.722,00)</b>	<b>(25.801.612.640,00)</b>	<b>98,43</b>

Sumber data : Sub. Bagian Keuangan DisnakerESDM Provinsi Bali

Untuk rincian realisasi anggaran program dan kegiatan pada Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2020 tersaji pada tabel berikut:

**Rincian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral  
Provinsi Bali Tahun 2020**

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp).	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)		Ket.
				Keu	Fisik	
<b>I.</b>	<b>Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja</b>	<b>2.938.061.328,00</b>	<b>2.856.993.163,00</b>	<b>97,24</b>	<b>100,00</b>	
01.	Penyediaan jasa surat	2.010.000,00	2.010.000,00	100,00	100,00	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Tahun 2020

39



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



	menyurat					
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	449.854.400,00	404.911.888,00	90,01	100,00	
03.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	570.250.000,00	545.051.422,00	95,58	100,00	
04.	Penyediaan alat tulis kantor	56.395.735,00	56.395.735,00	100,00	100,00	
05.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.312.300,00	23.312.300,00	100,00	100,00	
06.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.928.000,00	8.826.000,00	98,86	100,00	
07.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.580.000,00	13.220.000,00	97,35	100,00	
08.	Penyediaan makanan dan minuman	12.100.000,00	11.275.000,00	93,18	100,00	
09.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	29.965.435,00	29.965.435,00	100,00	100,00	
10.	Upacara keagamaan	45.000.000,00	43.866.000,00	97,48	100,00	
11.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	69.650.000,00	69.650.000,00	100,00	100,00	
12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	158.100.792,00	157.800.530,00	99,81	100,00	
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	1.074.047.436,00	1.067.592.288,00	99,40	100,00	
14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	380.159.480,00	378.408.815,00	99,54	100,00	
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	27.342.500,00	27.342.500,00	100,00	100,00	
16.	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	11.665.450,00	11.665.450,00	100,00	100,00	
17.	Penyusunan Informasi Ketenagakerjaan	5.449.800,00	5.449.800,00	100,00	100,00	
18.	Penyediaan bahan logistik kantor	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	





<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>196.378.600,00</b>	<b>196.378.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
01.	Pelatihan Assesor dan metodologi instruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.	Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Bali	3.175.600,00	3.175.600,00	100,00	100,00	
03.	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja(LPK)	10.265.200,00	10.265.200,00	100,00	100,00	
04.	Seleksi dan Pembinaan Asean Skills Competition (ASC)	2.253.700,00	2.253.700,00	100,00	100,00	
05.	Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.936.400,00	2.936.400,00	100,00	100,00	
06.	Pengembangan Sistem Link and Match antara Kompetensi Kewirausahaan Krama Bali dengan Dunia Usaha dan Industri	1.516.900,00	1.516.900,00	100,00	100,00	
07.	Pemasyarakatan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan Siddhakarya	18.911.400,00	18.911.400,00	100,00	100,00	
08.	Pengembangan Sistem Link and Match antara Kompetensi Tenaga Kerja Krama Bali dengan Dunia Usaha dan Industri	149.670.900,00	149.670.900,00	100,00	100,00	
09.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja melalui inkubator Bisnis dan Pendidikan/Pelatihan Kerja	3.926.500,00	3.926.500,00	100,00	100,00	
10.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Wirausaha Baru	2.139.300,00	2.139.300,00	100,00	100,00	
11.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja untuk Memenuhi Peluang Kerja pada Rencana investasi yang dikembangkan	1.582.700,00	1.582.700,00	100,00	100,00	





<b>III.</b>	<b>Program Perlindungan Tenaga Kerja</b>	<b>73.550.400,00</b>	<b>73.550.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
01.	Pembahasan dan Penetapan Peraturan Gubernur tentang UMP dan UMK	42.575.200,00	42.575.200,00	100,00	100,00	
02.	Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	9.889.600,00	9.889.600,00	100,00	100,00	
03.	Pembinaan LKS Bipartit di Perusahaan dan LKS Tripartit	7.492.000,00	7.492.000,00	100,00	100,00	
04.	Peningkatan Pemahaman Mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan Verifikasi Data Penyelesaian Hubungan Industrial	9.590.900,00	9.590.900,00	100,00	100,00	
05.	Pengembangan Jaminan Sosial Kesehatan Pekerja Krama Bali berdasarkan standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Berbasis Krama Bali Sejahtera (KBS)	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00	
06.	Pengendalian dan Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	502.700,00	502.700,00	100,00	100,00	





<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>26.037.750,00</b>	<b>26.037.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
01.	Perluasan Kerja sistim padat karya (PKSPK)	808.400,00	808.400,00	100,00	100,00	
02.	Penerapan pembekalan teknologi padat karya (TPK) sistim kelompok	1.888.500,00	1.888.500,00	100,00	100,00	
03.	Pengelolaan terhadap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	2.824.650,00	2.824.650,00	100,00	100,00	
04.	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	12.503.950,00	12.503.950,00	100,00	100,00	
05.	Pengembangan jaringan Informasi kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal dan Internasional Melalui Online, Lembaga Pemerintah, Pelaku Usaha Dalam dan Luar Negeri	1.087.300,00	1.087.300,00	100,00	100,00	
06.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penurunan Angka Pencari Kerja Krama Bali	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	100,00	
07.	Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Pelindungan Tenaga Kerja Krama Bali yang Bekerja di Luar Negeri (sesuai kewenangan)	2.302.600,00	2.302.600,00	100,00	100,00	
08.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Lapangan Kerja Krama Bali	2.472.350,00	2.472.350,00	100,00	100,00	
<b>V.</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal</b>	<b>4.189.700,00</b>	<b>4.189.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
01.	Identifikasi Potensi Kawasan Pekerja Sektor Informal	1.356.000,00	1.356.000,00	100,00	100,00	
02.	Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis lokal	2.824.700,00	2.824.700,00	100,00	100,00	





VI.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Calon	602.621.036,00	598.506.219,00	99,32	100,00	
01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	13.000.000,00	12.911.938,00	99,32	100,00	
02.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	198.827.000,00	198.827.000,00	100,00	100,00	
03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.525.000,00	18.525.000,00	100,00	100,00	
04.	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00	100,00	
05.	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.531.000,00	2.531.000,00	100,00	100,00	
06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	100,00	
07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	100,00	
08.	Upacara Keagamaan	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	100,00	
09.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	305.930.136,00	301.903.381,00	98,68	100,00	
10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.470.000,00	2.470.000,00	100,00	100,00	
11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.540.000,00	6.540.000,00	100,00	100,00	
12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	
13.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Industri dan Pariwisata	11.437.800,00	11.437.800,00	100,00	100,00	
14.	Identifikasi Kebutuhan Latihan	5.170.000,00	5.170.000,00	100,00	100,00	
15.	Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat	3.686.500,00	3.686.500,00	100,00	100,00	
16.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Paripurna berdasarkan Buku Biru sesuai Kebutuhan Pasar Domestik dan Global	2.793.400,00	2.793.400,00	100,00	100,00	







17.	Pengembangan Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi Penderita cacat permanen	1.035.200,00	1.035.200,00	100,00	100,00	
18.	Sertifikasi Instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VII.</b>	<b>Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja(BLK) Techno Park</b>	<b>7.013.700,00</b>	<b>7.013.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
01.	Pembangunan Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pelaku Usaha Pemula Ekonomi Kreatif Berbasis Inovasi,Teknologi dan Berorientasi Ramah Lingkungan Terintegrasi dengan Pelatihan Pelaku Usaha lainnya	3.907.000,00	3.907.000,00	100,00	100,00	
02.	Pengembangan Fasilitas dan Tenaga Pelatih Balai Latihan Kerja (BLK) yang mempunyai Kompetensi,sesuai hasil pemetaan Pengembangan Usaha,Industri dan Usaha Produk Unggulan Terintegrasi antar Kota/Kab	3.106.700,00	3.106.700,00	100,00	100,00	
<b>VIII.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja</b>	<b>398.540.650,00</b>	<b>394.397.619,00</b>	<b>98,96</b>	<b>100,00</b>	
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	699.000,00	699.000,00	100,00	100,00	
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Air dan Listrik	11.500.000,00	8.901.319,00	77,40	100,00	
03.	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	77.851.000,00	77.851.000,00	100,00	100,00	
04.	Penyediaan Alat Tulis kantor	13.015.000,00	13.015.000,00	100,00	100,00	
05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.712.000,00	11.712.000,00	100,00	100,00	
06.	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.739.500,00	1.739.500,00	100,00	100,00	
07.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	





08.	Penyediaan makanan dan minuman	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	
09.	Upacara keagamaan	12.000.000,00	11.475.000,00	95,63	100,00	
10.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	66.156.000,00	65.136.700,00	98,46	100,00	
11.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	100,00	
12.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	
13.	Pengadaan Bahan Kimia	193.203.000,00	193.203.000,00	100,00	100,00	
14.	Audit Akreditasi Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Pelatihan Keselamatan Kerja dan Hyperkes	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Kalibrasi Alat-alat Pemeriksaan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja	1.117.200,00	1.117.200,00	100,00	100,00	
18.	Pengujian Lingkungan Kerja	2.017.950,00	2.017.950,00	100,00	100,00	
<b>IX.</b>	<b>Program Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>227.783.292,00</b>	<b>227.483.030,00</b>	<b>99,86</b>	<b>100,00</b>	
01.	Pengembangan Ketenaga listrikan	19.480.600,00	19.480.600,00	100,00	100,00	
02.	Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	11.093.700,00	11.093.700,00	100,00	100,00	
03.	Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.940.200,00	9.940.200	100,00	100,00	
04.	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.887.400,00	12.887.400	100,00	100,00	
05.	Pengembangan Air Tanah dan Geologi Lingkungan	155.840.392,00	155.540.130,00	99,81	100,00	
06.	Pengelolaan Air Tanah	18.541.000,00	18.541.000,00	100,00	100,00	
<b>X.</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian</b>	<b>2.016.900,00</b>	<b>2.016.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
01.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Ketransmigrasian	2.016.900,00	2.016.900,00	100,00	100,00	





## BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah disepakati, sebagai pelaksana akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap delapan sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak sebelas indikator.

Penyelenggaraan program/kegiatan di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Adanya pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap program/kegiatan yang direncanakan sehingga berdampak pula pada realisasi capaian yang tidak sesuai target. Realisasi capaian kinerja juga ditentukan oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana. Untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah sesuai target, bahkan meningkatkannya, dan juga capaian yang tidak sesuai target, diperlukan berbagai langkah inovatif, serta kerja sama dengan pihak - pihak terkait, bersinergi dengan lembaga terkait, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

KEPALA DINAS,

**IDA BAGUS NGURAH ARDA**

NIP. 19621231 198512 1 068

